

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM MEMANTAPKAN PERILAKU MORAL ANAK DI KABUPATEN ACEH TENGAH

**Wen Yusri Rahman, Prof. Dr. Murniati AR, M. Pd, Dr. Djailani AR, M. Pd.**

Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh  
Email: [wenrahman@ymail.com](mailto:wenrahman@ymail.com)

***Abstract:** Children's moral behavior is influenced by formal and non-formal education. The system of education is also influenced by educational policy. Formulation, implementation of educational policy needs to be evaluated for being appropriate to the objective of education. This research aimed to find out the implementation of educational policy, which included: 1) Program of family education, 2) Implementation of educational policy, and 3) Educational obstacles for improving children's moral behavior in Aceh Tengah District. The research used a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interview, documentation and observation. The subjects of research were Head of Education Ministry in Aceh Tengah District and society figure. From the research results, it was found that there was no one of government policy which was established into regional government regulations (qanun) about children's moral education, and many family education programs were still run based on parents experience by generation to generation. For children's moral education out of school time, a regional government issued appeals of reading Al Quran after magrib and activating communal Quran reading. The obstacles of family education in Aceh Tengah were that unequal parental education and weak economy so that children's development was given over to education institutions. There were no programmed, detailed socialization and society mapping, and the role of society in educating a generation had already been decreased since it was oriented materials. It is recommended that a program of family education about children's moral should be formulated to be a regional policy by involving all stakeholders.*

**Keywords:** Educational policy and family education

**Abstrak:** Perilaku moral anak dipengaruhi oleh pendidikan formal dan non formal. Sistem pendidikan juga dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan. Perumusan, implementasi kebijakan pendidikan perlu dievaluasi agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pendidikan keluarga dalam memantapkan perilaku anak di Kabupaten Aceh Tengah, mencakup, 1) Program pendidikan keluarga, 2) Pelaksanaan kebijakan pendidikan, dan 3) Hambatan-hambatan pendidikan dalam memantapkan perilaku moral anak di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Subjek penelitiannya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian, ditemukan belum adanya satupun kebijakan pemerintah yang ditetapkan ke dalam peraturan pemerintah daerah (qanun) untuk pendidikan moral anak, program pendidikan keluarga masih banyak dijalankan berdasarkan pengalaman orang tua secara turun temurun. Pendidikan moral anak di luar jam sekolah, pemerintah daerah mengeluarkan himbauan mengaji ba'da magrib dan mengaktifkan pengajian-pengajian. Hambatan pendidikan keluarga di Aceh Tengah yaitu tidak meratanya pendidikan orang tua, ekonomi lemah, sehingga perkembangan anak diserahkan kepada lembaga pendidikan. Sosialisasi dan pemetaan masyarakat yang rinci dan terprogram belum ada, peran masyarakat dalam mendidik generasi sudah mulai berkurang karena berorientasi pada materi. Perlu direkomendasikan, program pendidikan keluarga tentang moral anak harus dirumuskan menjadi kebijakan daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder.

**Kata Kunci:** Pendidikan keluarga dan kebijakan pendidikan

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan sumber daya yang perlu dididik sebagai generasi penerus bangsa. Pada usia anak-anak hingga dewasa dianggap sebagai investasi terbesar bagi orang tuanya dan secara global merupakan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bangsa. Untuk menciptakan investasi yang baik, maka anak perlu dibekali ilmu pengetahuan maupun agama sebagai bekal menjalani kehidupan sosial masyarakat.

Dalam lingkungan keluarga orang tua memegang tanggung jawab terhadap anak sebagai amanah dan karunia dari Allah SWT. Secara formal, lembaga pendidikan baik swasta maupun lembaga pemerintah harus memberikan pendidikan bagi setiap orang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Orang tua harus memiliki program-program untuk mendukung terciptanya keluarga yang lebih baik. Mengatur dan meningkatkan pendidikan, Pemerintah juga selalu membuat program-program untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan juga sangat penting terkait dengan moral anak didik. Kebijakan pendidikan mencakup seperangkat ketetapan, peraturan mengenai pendidikan yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dengan latar belakang masyarakat yang diawali dengan perumusan, penetapan, implementasi hingga pada evaluasi. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa Undang-Undang pendidikan, intruksi, peraturan pemerintah,

keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan.

Penulis mengamati peran pendidikan di lingkungan keluarga mulai terkikis dengan kehidupan masyarakat yang mulai materialistik, dimana orang tua mulai tidak memainkan perannya yang besar sebagai pendidik tempat mula anak mendapatkan pendidikan, baik moralitas. Hal itu terlihat, salah satunya dengan banyaknya perbuatan asusila yang terjadi, seperti inses (hubungan sek sedarah).

Timbulnya inses dalam lingkungan keluarga bisa saja disebabkan beberapa faktor, antara lain karena faktor agama (keimanan) atau pendidikan yang minim. Bicara dari sudut agama, sudah jelas sebagai pencegahan adalah iman di tiap diri manusia. Ada juga faktor pengaruh media masa, informasi media cetak, elektronik, kepingan-kepingan VCD porno yang merebak di masyarakat dan faktor lingkungan.

Berbicara inses di Aceh khususnya, sangatlah tidak layak karena Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, yang dikuatkan dengan qanun syariat Islam-nya. Sehingga inses di Provinsi Aceh dapat dikatakan sebagai fenomena yang harus ditanggulangi dengan mengutamakan dan member perhatian lebih terhadap pendidikan anak.

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

### *Hakikat Pendidikan*

Hakikat pendidikan dalam ajaran Islam adalah mengembalikan nilai-nilai illahiyah pada manusia (fitrah) dengan bimbingan Alquran dan

hadits, sehingga menjadi manusia berakhlakul karimah. Melalui pendidikan, anak diarahkan kepada hakekat kehidupan manusia untuk pembentukan kepribadian yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk beragama (religius).

Hakekat pendidikan itu sendiri memiliki korelasi kepada pandangan tentang hakekat manusia. Ada beberapa pandangan manusia menurut para tokoh, seperti diutarakan Dewantara (Tilaar, 2009: 46), menurutnya “manusia itu pada dasarnya merupakan makhluk yang berdiri sendiri dan bertanggungjawab atas eksistensinya.”

Pandangan lain tentang pendidikan dan manusia, menurut kaum Progresivisme (Sudiyono, 2009: 17), mengatakan “Progresivisme berpendirian bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam keberadaan manusia dalam usaha untuk mengalami kemajuan atau progress.” Sementara kaum Esensialisme berpendirian bahwa pendidikan berfungsi sebagai pemelihara kebudayaan.

Dunia pendidikan di Indonesia dinilai sebahagian para tokoh masih “sakit”, karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia seperti makna hakikat manusia. Setidaknya pendidikan dapat difahami seperti pendapat kaum Perennialisme, (Sudiyono, 2009: 18) yang menyebutkan bahwa “pendidikan adalah persiapan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Pandangan ini berpangkal pada

ontologi bahwa peserta didik ada dalam fase potensialitas menuju aktualitas, menuju kematangan.”

Dapat difahami hakikat pendidikan sejalan dengan pemahaman tentang hakikat manusia, karena hakikat pendidikan seperti dirangkumkan Sudiyono (2009: 29) yang menyatakan “hakikat pendidikan Islam ialah proses membimbing, mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan.”

### ***Kebijakan Pendidikan***

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia dikenal pendidikan formal, dilaksanakan dengan terstruktur dan berjenjang. Ada juga kebijakan pendidikan nonformal yang meliputi kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan dan lain-lain. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas pasal 26 ayat (1), bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan sebagai pelengkap pendidikan formal. Guna mendukung pelaksanaan pendidikan dituntut kehadiran kebijakan-kebijakan pendidikan baik formal maupun nonformal bagi pendidik maupun penyelenggara pendidikan.

Menurut Anderson (Alifudin, 2011: 5) kebijakan merupakan “arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.” Dinyatakan oleh Tilaar dan Nugroho (2009: 140) bahwa “kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan

langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.”

Dalam menganalisa suatu kebijakan kebijakan, maka perlu dilakukan pendekatan-pendekatan antara lain:

#### 1. Pendekatan dalam Analisis Kebijakan

- a. Pendekatan empiris/analitik yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu kebijakan, memusatkan perhatian pada masalah pokok, menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik.
- b. Pendekatan evaluatif, yaitu menilai manfaat (value) dari suatu kebijakan, berkaitan dengan penentuan harga atau nilai dari beberapa kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan bersifat evaluatif.
- c. Pendekatan normatif, yaitu tindakan apa yang semestinya dilakukan untuk perumusan kebijakan mendatang. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif.

#### 2. Komponen yang harus ada dalam Kebijakan,

- a) Goal (tujuan) dalam suatu kebijakan perlu dirumuskan tujuan yang diinginkan.
- b) Komponen kedua dalam kebijakan adalah perencanaan (*plan*) atau proposal.
- c) Program kebijakan, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
- d). Keputusan

(*decision*), yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan nilai. e) Effect yaitu akibat dari rencana kebijakan.

#### 3. Proses Kebijakan

Proses kebijakan pendidikan dapat lebih mudah dipahami bila kebijakan itu dikaji tahap demi tahap, disebutkan Subarsono (2005: 10), diantaranya perumusan masalah, peramalan, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi.

**Tabel. 1 Proses Kebijakan**

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Forecasting (peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkan alternative kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan
Rekomendasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternative dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling tinggi
Monitoring Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
Evaluasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Sumber: Subarsono (2005: 10)

#### 4. Perumusan Kebijakan Pendidikan

Pembahasan dalam perumusan kebijakan pendidikan meliputi; lingkungan kebijakan pendidikan, aktor-aktor perumusan kebijakan pendidikan, masalah dan agenda kebijaksanaan pendidikan, formulasi kebijakan pendidikan segala permasalahannya. Kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan perumusan kebijakan pendidikan, legitimasi pendidikan,

komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, mengupayakan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan dan evaluasi kebijakan pendidikan.

#### 5. Formulasi Kebijakan Pendidikan

Formulasi kebijakan yang baik adalah formulasi kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi.

#### 6. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam kebijakan. Tahap tersebut menentukan apakah kebijakan yang ditempuh di lapangan menghasilkan *output* atau *outcomes* sesuai perencanaannya. Implementasi kebijakan akan gagal jika terlalu banyak lembaga yang bermain. Indiahono (2009: 143) menyatakan “*output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan.”

Dalam implementasi kebijakan terkait tiga hal seperti dirangkumkan Alifudin (2011: 12) dari beberapa pendapat:

Pertama, adanya tujuan atau sasaran kebijakan. Kedua, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan. Ketiga, adanya hasil kegiatan. Berarti implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya mendapat suatu hasil sesuai dengan tujuan

dan saran kebijakan.

Implementasi kebijakan bila tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat dilakukan evaluasi. Berdasarkan metode analisis kebijakan salah satunya guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan.

#### 7. Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional yaitu tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dikatakan Indiahono (2009: 145) “evaluasi kebijakan adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan.” Sedangkan Alifudin (2011: 35) menyebutkan evaluasi kebijakan untuk mengetahui empat aspek; “proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan.” Evaluasi kebijakan berperan sebagai fungsi pengawasan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konsituennya dalam rangka melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

### ***Pendidikan Keluarga***

Ruang lingkup pendidikan, dikenal tiga wilayah pendidikan yang sangat berpengaruh bagi peserta didik yakni informal, formal dan nonformal. Pendidikan nonformal sering disebut dengan keluarga dan masyarakat. Namun dari ketiga lahan pendidikan tersebut dewasa ini hanya dua lahan yang sangat berpengaruh dalam pendidikan anak yakni sekolah dan keluarga.

Pendidikan keluarga adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat.

Keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang utama karena sebagian besar hidup anak berada dalam keluarga, maka pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga.

Pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari keluarga sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan diri seseorang, dan akan binasalah pergaulan seseorang bila orang tua tidak menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Sudiyono (2009: 302) mengemukakan bahwa “keluarga yang ideal ialah keluarga yang mau memberikan dorongan kuat kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama. Tetapi apabila tidak mampu tidak berkesempatan, maka mereka datangkan guru agama, untuk memberikan pelajaran privat kepada anak-anak mereka.”

Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk menciptakan suatu masyarakat yang aman, tenteram, bahagia dan

sejahtera, yang semua itu harus dijalankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil. Mufidah (2008: 43) menjelaskan bahwa “berdasarkan pendekatan budaya keluarga sekurangnya mempunyai tujuh fungsi. yaitu, fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif dan ekonomis.”

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan keluarga dapat diartikan sebagai usaha dan upaya orang tua dalam memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan dan pembentukan kepribadian anak serta memberikan bekal pengetahuan terhadap anak. Sesuai tujuan pendidikan yang searah dengan hakikat pendidikan maupun hakikat manusia, maka moral dan etika anak juga menjadi bahagian dari tugas dan fungsi keluarga.

### ***Moral dan Etika***

Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab, juga diartikan ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak). Menurut asal kata “moral berasal dari Bahasa Latin yaitu kata *mos* (adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan), *mores* (adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup), (Sjarkawi, 2009: 27).

Dalam kehidupan bermasyarakat, moral merupakan aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku dan moral dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya atau baik-tidaknya tindakan manusia.

Teori Kohlberg (Zuchdi, 2009: 10) mengenai perkembangan moral menyatakan

bahwa, “kognisi (pikiran) dan afek (perasaan) berkembang secara paralel dan keputusan moral merupakan proses perkembangan kognisi secara alami.” Menurut Bertens (Sjarkawi, 2009: 27);

Etika mempunyai tiga arti; pertama, etika dalam arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Dalam artian ini etika dimaksudkan sebagai kode etik. Ketiga, etika dalam arti ilmu tentang yang baik dan buruk.

Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk system nilai yang ada. Etika dan moral mempunyai fungsi yang sama yaitu memberi orientasi bagaimana seseorang harus melangkah hidup.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif dapat merekam situasi sosial, peristiwa dari subjek penelitian. Sehubungan itu maka jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti dijelaskan Moleong (2008: 6) penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang diamati subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik.”

Subjek dari penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan pengambil kebijakan pendidikan di Aceh Tengah. Subjek penelitian merupakan sumber daya yang memberikan kejelasan mengenai duduk persoalan yang dikaji atau sumber yang

memberikan informasi secara lengkap dan cermat mengenai beberapa peristiwa, manusia, dan situasi yang diobservasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian. Bila pengumpulan data reliabel dan valid maka data yang dihasilkan akan reliabel dan valid juga. “Dimana pewawancara juga harus memiliki keterampilan dan kemahiran berwawancara dan sebagainya,” (Setyosari, 2010: 189).

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis dekriptif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai obyek penelitian dengan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data secara sistematis dan diformulasikan sedemikian rupa hingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif.

#### **HASIL PEMBAHASAN**

##### ***Program Pendidikan Keluarga***

Pendidikan keluarga di Kabupaten Aceh Tengah masih mengikuti pola pendidikan orang tua. Aturan dalam adat dan norma yang berlaku di Aceh Tengah khususnya bagi masyarakat Gayo, kini dinilai sudah mulai tidak diaplikasikan. Orang tua dalam mendidik anak lebih berdasarkan kepada pengalaman, dijalankan masing-masing keluarga tanpa adanya evaluasi.

Salah satu bentuk program pendidikan anak untuk memantapkan moral anak dalam keluarga, dalam masyarakat Gayo dikenal norma

dan nilai-nilai adat, seperti adanya *sumang* (tabu/sumbang); *sumang peceraken* (tabu berbicara yang tidak sopan), *sumang kemunulen* (tabu duduk bersama orang bukan muhriin dan tabu duduk sejajar dengan orang yang lebih dihormati/dituakan), *sumang pelangkahan* (sumbang atau tabu berjalan bersama nonmuhriin terlebih menuju tempat yang sunyi) dan *sumang penengonen* (sumbang melihat yang tidak baik, tabu melihat aurat orang lain).

Program mendidik anak juga ada dalam lingkungan masyarakat seperti melalui kesenian, salah satunya dalam bentuk Didong Gayo (seni tepuk tangan). Didong, biasanya berisi pesan-pesan dalam kehidupan sosial untuk mendidik masyarakat. Selain berkisah kehidupan sosial, tokoh utama dalam berdidong (*ceh*), membawakan pesan-pesan pendidikan dalam bentuk syair yang didendangkan diiringi tepukan tangan yang berirama.

Nilai didong dulunya hampir sama seperti pewayangan Jawa yang mengajarkan nilai pendidikan dan agama kepada masyarakat, melalui kesenian. Tapi kini, nilai didong mulai terkikis dari makna didong itu sendiri. Banyaknya *ceh* yang menendangkan syair tidak lagi dalam bahasa bertamsil. Didong, (biasanya dimainkan dua group yang berbeda) saat ini menjadi “pulgar” karena ada hujatan kepada pihak lawan yang disampaikan secara langsung, sementara dahulunya disampaikan dengan perumpamaan dan dinilai masih patut dan sopan.

Secara formil, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjalankan program masih

dilakukan sesuai program pemerintah pusat. Bahwa pemerintahan yang otonom dapat memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten untuk merumuskan program-program sesuai kondisi pendidikan di lapangan dengan dukungan dana yang dianggarkan sesuai kebutuhan.

Adanya undang-undang pendidikan yang baru, pemerintah daerah bisa membuat program yang inovatif tidak terpaku pada program pemerintah pusat. “Secara konsep, system desentralisasi pendidikan memang lebih baik dari pada sentralisasi pendidikan,” (Suardi, 2012: 69).

Faktor kewenangan pendidikan baik sentralisasi maupun desentralisasi tidak serta merta menghilangkan/melepaskan tanggungjawab orang tua terhadap anak. Melalui lembaga pendidikan formal, nonformal masih membutuhkan pengawasan melekat dari orang tua terhadap anak didik. Pendidikan yang disertai pengawasan yaitu mendampingi anak dalam upaya membentuk akidah dan moral, mengasihinya dan mempersiapkan secara psikis dan sosial, memantau secara terus menerus tentang keadaannya baik dalam pendidikan jasmani maupun dalam hal belajarnya. Mendidik yang disertai pengawasan bertujuan untuk melihat langsung tentang bagaimana keadaan tingkah laku anak sehari-harinya baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.

#### ***Kebijakan Pendidikan Keluarga***

Tatanan masyarakat Aceh Tengah, pendidikan sangat diutamakan terbukti dengan

adanya nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih gamlang dipaparkan Ibrahim (2013: 17):

Nilai norma adat Gayo tersebut dihayati dan diungkapkan melalui bahasa, ada Gayo. *Agama urum edet lagu zet urum sipet* (agama Islam dan adat Gayo seperti zat dengan sifat, yang tidak dapat dipisahkan). *Edet ken peger agama kin senuwen* (adat Gayo jadi pagar Islam sebagai tanaman). *Turuni eadet ari petuwe merhum, turun agama ari cik serule* (urusan adat adalah wewenang meurah (pemimpin pemerintah) urusan agama wewenang imem (ulama) keduanya harus padu. *Edet mu ukum besipet wujud ukum munukum bersifet kalam* (adat menetapkan hukum berdasarkan bukti, agama menerapkan hukum berdasarkan Al quran dan sunnah rasul). *Beras padi tungket imen* (kebutuhan dasar memadai menunjang kemantapan iman) manusia terdiri dari dua potensi pokok yaitu jasmani dan rohani. *Kuwet edet muperala agama, rengga edet benasa nahma* (kalau adat dilaksanakan dengan baik, maka ajaran agama Islam terlaksana dengan baik pula). *Dewe ukum ulaken ku firman, dewe edet ulaken ku empuye* (beda pendapat mengenai agama kembalikan kepada Al quran, beda pendapat tentang adat diminta pendapat pemerintah selaku penguasa adat). *Kati makmur ukum kena kuwet edet* (syariat terlaksana dengan baik karena adat kuat).

Dari nilai-nilai dalam adat Gayo itu, diketahui pentingnya pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam. Apapun kebijakan orang tua dalam mendidik anak, tidak meninggalkan nilai dan norma yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai faktor pendukung moralitas anak. Nilai budaya yang ada tidak melanggar aturan hukum maupun Al Quran dan hadist dan nilai adat Gayo yang harus difahami.

Hasil penelitian penulis menemukan

kebijakan daerah juga masih berfokus pada kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dalam merumuskan kebijakan tidak ada yang langsung bersentuhan dengan pendidikan keluarga guna memantapkan perilaku moral anak.

Kebijakan pendidikan dalam keluarga yang masih bergantung pada latar pendidikan dan kemampuan orang tua, harus benar-benar memberikan ruang kepada anak untuk belajar agama, atau diajarkan. Apabila orang tua tidak mampu menjalankan amanah sebagai pendidik pertama dalam keluarga, dapat diserahkan kepada lingkungan masyarakat. “Keluarga yang ideal ialah keluarga yang mau memberikan dorongan kuat kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama. Tetapi apabila tidak mampu, tidak berkesempatan, maka mereka datangkan guru agama, untuk memberikan pelajaran privat kepada anak-anak mereka,” (Sudiyono, 2009: 302).

Mencapai pendidikan moral yang baik, perlu kebijakan yang setidaknya dapat menghindarkan anak dari perbuatan tercela. Quth dalam bukunya *Minhajut Tarbiyah Islamiyah* (Sudiyono, 2009: 190) mengemukakan beberapa teknik atau metode pendidikan Islam, yaitu: pendidikan melalui teladan, pendidikan melalui nasihat, pendidikan melalui hukuman, pendidikan melalui cerita, pendidikan melalui kebiasaan, menyalurkan kekuatan, mengisi kekosongan dan pendidikan melalui peristiwa-peristiwa.

Disimpulkan bahwa teori yang masih digunakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

dalam formulasi kebijakan menggunakan teori kelembagaan. Tilaar dan Nugroho (2009: 191) “tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, teori ini menekankan formulasi kebijakan pada lembaga-lembaga dari pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungan.”

Perilaku moral anak yang perlu dirumuskan kebijakan tidak tepat hanya dengan prinsip teori kelembagaan saja karena lembaga pembuat kebijakan kurang memahami lingkungan.

Masalah pendidikan keluarga terkait perilaku moral anak menjadi tanggung jawab semua pihak. Kebijakan pendidikan harus melibatkan seluruh stakeholder sehingga kebijakan dapat membangun kehidupan publik yang tertib sesuai tujuan pendidikan. Tilaar dan Nugroho (2009: 269) menyatakan, “Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan bangsa secara keseluruhan.”

Kebijakan pemerintah dalam implementasinya diarahkan kepada tujuan dan sasarannya, dengan demikian perumusan kebijakan dengan teori kelembagaan pada kebijakan pendidikan dalam keluarga dianggap kurang relevan.

Perilaku moral anak dipengaruhi faktor pendidikan dan lingkungan, dapat dirumuskan dengan kebijakan teori kelompok. Inti gagasannya dikatakan Tilaar dan Nugroho

(2009: 269) adalah “interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan yang terbaik. Individu dalam kelompok kepentingan berinteraksi secara formal maupun informal, secara langsung atau melalui media menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan.”

Teori kelompok didukung dengan teori demokratis, dikatakan demokratis karena menghendaki setiap pemilik hak demokrasi diikuti sebanyak-banyaknya. Meski kurang efektif dalam mengatasi masalah yang kritis, darurat dan kelangkaan sumber daya tetapi dengan teori “pilihan publik” ini, semua pihak “mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan. Karena setiap pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan,” (Tilaar dan Nugroho, 2009: 201). Dengan menggabungkan teori tersebut menjadi tidak adanya kesenjangan antara sekolah dan masyarakat. “Salah satu yang menyebabkan kesenjangan antara sekolah dan masyarakat adalah kurangnya informasi yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah dan hubungan antara komunitas masyarakat dengan pemerintah kurang dekat,” (Mulyasa, 2009: 114).

***Hambatan-hambatan Pendidikan Keluarga dalam Memantapkan Perilaku Moral Anak di Kabupaten Aceh Tengah.***

Pendidikan keluarga terhambat karena masyarakat sudah mulai kurang mengetahui dan memahami nilai adat budaya setempat. Pendidikan orang tua juga menjadi penghambat bagi perkembangan pendidikan anak dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi.

Lembaga formal, Dinas Pendidikan Aceh Tengah juga memahami hambatan dalam memantapkan perilaku moral anak karena masih minimnya pemahaman dan kemampuan guru-guru dalam mendidik anak. Kualitas SDM dan mutu pendidikan masih rendah, masih lemahnya manajemen dan tata kelola pendidikan, masih rendahnya kesadaran terhadap system perlindungan anak.

Sementara di Kantor Kementerian Agama yang menjalankan program penyuluhan dan bimbingan teknis pranikah terhadap pelajar mendapati hambatan kurangnya dana. Melihat pentingnya program penyuluhan pranikah, masyarakat melalui lembaga legislatif ataupun bersama pengambil kebijakan bisa mengusulkan anggaran baik dari pemerintah pusat, tingkat I (satu) maupun pemerintah kabupaten setempat sesuai dengan tujuan pendidikan dan anggaran pendidikan yang mengharuskan 20 persen dari anggaran daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### ***Kesimpulan***

Pendidikan keluarga di Aceh Tengah dilaksanakan secara turun temurun berdasarkan pengalaman orang tua. Nilai adat dan budaya tentang pendidikan masih berjalan namun mengalami penurunan karena barbagai faktor dari orang tua.

Program Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang sudah dan sedang dijalankan berdasarkan program pemerintah pusat. Belum ada kebijakan daerah yang ditetapkan ke dalam peraturan daerah sesuai potensi dan permasalahan pendidikan yang ada.

Selain program tersebut, ada kebijakan

pemerintah dengan mengeluarkan himbaun kepada masyarakat untuk melakukan pengajian setelah magrib sebagai program non formal bagi pendidikan keluarga. Menghimbau kepada setiap madrasah untuk melaksanakan pengajian bersama di sekolah masing-masing baik Yasinan atau pun kuliah tujuh menit (kultum).

Program bimbingan teknis pranikah bagi pelajar-pelajar yang dilaksanakan setiap tahun juga dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah.

### ***Saran***

Program untuk mencapai perilaku moral anak yang baik perlu dirumuskan sesuai kondisi di daerah, tidak serta merta program pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten juga perlu memasukan nilai adat dan budaya lokal dimasukan dalam muatan lokal sekolah karena banyak nilai adat yang perlu diajarkan sebagai pendidikan anak karena tidak bertentangan dengan agama maupun tujuan pendidikan, sekaligus menjaga budaya masyarakat.

Program pemerintah melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) dan wajib belajar kiranya dapat terus disosialisasikan dan menambah program kerja terkait pendidikan keluarga. Orang tua harus menyempatkan diri untuk mengawasi anak. Program bimbingan teknis pranikah bagi pelajar-pelajar perlu ditambah anggaran agar semua siswa di setiap lembaga pendidikan dapat diberikan penyuluhan. Setiap lembaga tidak bisa berdiri sendiri dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Aceh Tengah sehingga komitmen para pimpinan SKPK perlu bersinergi.

Kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus terus ditingkatkan dan memiliki

kompetensi diiringi dengan penyebaran guru yang merata tanpa pandang bulu demi mutu pendidikan. Guru harus bisa memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Dimana guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi professional.

Zuchdi, Darmiyati, Prof. Ed.D., (2009). *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alifuddin, Mohd, (2011). *Kebijakan Pendidikan Non Norformal*. Jakarta: Magnascript.
- Ibrahim, Mahmud, (2013). *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo*. Banda Aceh: Al Mumtaz Institute.
- Indiahono, Dwiyanto, (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J, (2009), *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, Mpd, Prof. (2009), *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mufidah (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Sjarkawi (2009). *Pembentukan Kepribadian Anak. Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suardi (2012). *Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks.
- Subarsono, AG, (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono, H.M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, Riant, (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.